

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, Genta Publishing Cet. Pertama, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta.

_____, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Jakarta.

Basuki Minarno, Nur, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya.

Basah, Sjachran 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Chazawi, Adami, 2005, *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, bayu media publishing, edisi pertama cet.kedua, Malang.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1995 , *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung.

Hiariej, Eddy O.S, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 1997, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Cita Aditya Sakti cet. III, bandung.

Loqman, Loebby 1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Marsono, 1999-2002, *Susunan dalam satu naskah UUD 1945 dengan perubahan-perubahannya*, Eko Jaya, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda 2002, *Sari kuliah, Perbandingan hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi I, Cetakan , Jakarta.

Pope, Jermy 2003, *Confronting Corruption ; The elements of Nasional Integrity System*, Transparancy Internasional Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat Cet.I, Jakarta.

Wiyono, R, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika cet.kedua, Jakarta.

Zaeni, Asyihadie, 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jakarta, Bina Aksara, 2002.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

C. Internet.

Detik.com, “Artidjo Alkostar naikan lima kali lipat hukuman ibu rumah tangga di korupsi lahan BPK “, <http://news.detik.com/berita/3182963/artidjo-naikkan-lima-kali-lipat-hukuman-ibu-rumah-tangga-di-korupsi-lahan-bpk.html>, diakses tanggal 25 Januari 2016.

Hamzah, Andi, “subjek hukum UU Korupsi adalah pejabat publik”, [http ://www.beritasatu.com/hukum/156435-andi-hamzah-subjek-hukum-uu-korupsi-adalah-pejabat publik.html](http://www.beritasatu.com/hukum/156435-andi-hamzah-subjek-hukum-uu-korupsi-adalah-pejabat-publik.html), diakses tanggal 30 Desember 2015.

Sjarie, Aminudin,,”Penyelenggara Negara”, [http ://www.bataviase.co.id/artikel-penyelenggara-negara.html](http://www.bataviase.co.id/artikel-penyelenggara-negara.html), diakses 30 Juli 2015.

D. Makalah/Pidato.

Barus, Kariawan, 2011, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hamzah,Guntur,”UUAP, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, *Pidato*, Seminar Nasional dalam Rangka HUT IKAHI ke 62, Jakarta, 2015.

S.F.Marbun, "UUAP, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi", *Pidato*, Seminar Nasional dalam Rangka HUT IKAHI ke 62, Jakarta, 2015.

Supandji, Hendarman, "Korupsi dan Penegakan Hukum", *Pidato*, Seminar Nasional Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik, Jakarta, Agustus 2006.

Vidya Prahassacitta, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

E. Wawancara.

Hongkun Otoh. Wawancara. Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Samarinda/Tipikor/PHI, 7 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015.

Parmatoni. Wawancara. Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Samarinda/Tipikor/PHI, 7 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015.